



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN PT PLN (PERSERO) AREA TEGAL**

**MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2020-2021
9-13 OKTOBER 2020**

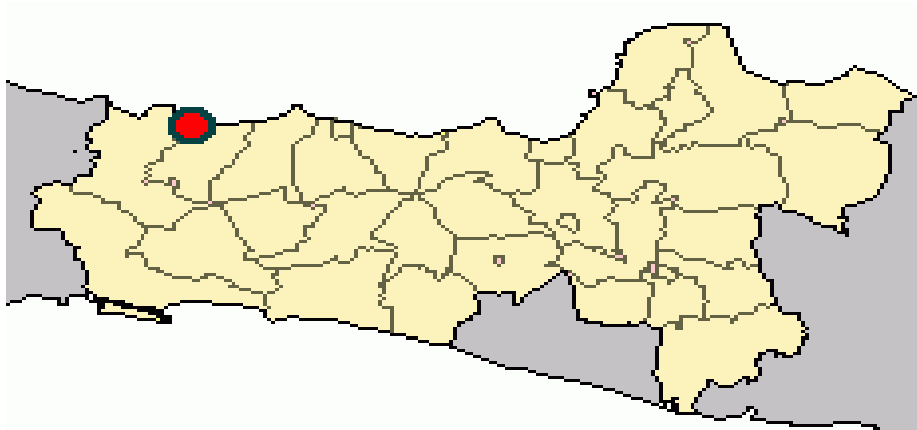
**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tegal merupakan sebuah wilayah yang berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang. Dilihat dari letak geografisnya, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Kota Tegal memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Untuk perekonomian, perdagangan dan jasa merupakan sektor utama ekonomi kota Tegal. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat.



Gambar: Peta Kota Tegal

Terkait sektor kelistrikan, Rasio Elektrifikasi (RE) hingga Agustus 2020 untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya adalah 99,99%. Sementara itu, RE untuk Kabupaten dan Kota Tegal masing-masing 100%. Berdasarkan data per Agustus 2020, pasokan sistem kelistrikan Jawa Tengah adalah sebesar 9.039,72 MW. Dengan total beban puncak sebesar 4.473 MW, maka terdapat cadangan pasokan sebesar 4.566,72 MW untuk Jawa Tengah. Data untuk jumlah pelanggan rumah tangga PLN adalah sebesar 401.634 untuk Kabupaten Tegal, dan 74.055 untuk Kota Tegal. Dikarenakan Tegal merupakan pusat bisnis yang strategis, maka tentunya pasokan

listrik untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan di wilayah Tegal, selain tentunya kebutuhan listrik rumah tangga, akan selalu meningkat.

Dengan RE yang cukup tinggi baik di Jawa Tengah pada umumnya maupun di area Tegal pada khususnya, ternyata masalah pemadaman listrik masih cukup sering terjadi di beberapa daerah di Jateng. Untuk Kabupaten Tegal dan juga masyarakat Kabupaten Pemalang yang termasuk wilayah pemasaran PT PLN (Persero) Area Manager Tegal masih sering mengalami terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman listrik tersebut dikarenakan adanya penggantian trafo, recloser, pemasangan SR (Sambungan Rumah) dan APP (Alat Pengukur dan Pembatas), serta faktor teknis lainnya. Selain kendala teknis kelistrikan yang berakibat pada adanya pemadaman, masalah lain seperti kenaikan tarif listrik juga dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Kota Tegal terutama selama masa pandemi Covid-19. Keluhan tersebut sebagian besar datang dari masyarakat yang seharusnya kemampuan ekonominya memperoleh harga subsidi tapi masih membayar lebih mahal listrik per kWh. Padahal di era pandemi Covid-19 kemampuan ekonomi masyarakat secara umum banyak menurun. Untuk itu, perlu adanya informasi yang lebih aktif dan transparan oleh pihak PLN terkait biaya kelistrikan dan hal-hal lainnya kepada masyarakat. Di samping itu, PLN masih harus terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang baik melalui perluasan jaringan PLN maupun pembangunan pembangkit-pembangkit listrik.

Untuk bidang energi, diketahui Pemerintah terus mendorong investasi sumber energi baru dan terbarukan untuk mengantisipasi menipisnya ketersediaan energi fosil. Beberapa rencana pembangkit-pembangkit dengan memanfaatkan potensi alam area Tegal akan dilakukan. Diketahui, Pemerintah kota Tegal bekerjasama dengan investor asing yakni PT Java Energi Eoliana atau *Aquo Energy* akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di wilayah Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. PLTB akan dibangun dengan memanfaatkan tenaga angin di pantai-pantai Kota Tegal. PLTB Tegal ini diproyeksikan akan menjadi pembangkit listrik tenaga angin yang pertama di Pulau Jawa, dengan kapasitas pembangkit sebesar 67,2 megawatt atau setara 215,5 gigawatt *hours* per tahun dan diproyeksikan beroperasi tahun 2022 mendatang. PLTB ini akan dibangun pada lahan seluas 47 hektar yang beririsan dengan tiga desa yakni Desa Pakulaut, Desa Marga Ayu dan Desa Kalisalak, serta direncanakan akan mengoperasikan 17 turbin berbentuk kincir angin raksasa.

Setiap turbin dari PLTB ini akan mempunyai kapasitas sebesar 4 megawatt. Komisi VII DPR RI berharap rencana pembangunan PLTB ini dilaksanakan dengan proses perizinan yang sesuai dan terlebih dahulu dilakukan studi-studi terkait, diantaranya adalah studi mengenai dampak lingkungan atau AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan).

Selain PLTB, terdapat pula rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah Tegal. Diketahui Tegal memiliki potensi beberapa sungai yang debit air nya bisa dijadikan sebagai sumber PLTMH yakni salah satunya berasal dari Sungai Guci Kabupaten Tegal. Terdapat pula rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Gucci yang berkekuatan 1x55MW yang mana diperuntukkan untuk mengatasi krisis listrik di Pulau Jawa. Tentunya Komisi VII DPR RI mendorong adanya potensi-potensi lain yang dimiliki wilayah Tegal untuk digunakan semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi pasokan ketenagalistrikan di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya alam serta kegiatan riset dan teknologi, memandang perlu untuk menjadikan PT PLN (Persero) Area Tegal sebagai obyek Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 - 2021. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengetahui berbagai kendala dan tantangan bidang energi dan ketenagalistrikan di Kota Tegal secara keseluruhan, serta khususnya rencana pembangunan pembangkit-pembangkit listrik di wilayah Tegal. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang-bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

B. Dasar Hukum Kunjungan

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke PT PLN (Persero) Area Tegal adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta ketenagalistrikan.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung perkembangan, khususnya sektor energi dan bidang kelistrikan di PT PLN (Persero) Area Tegal.
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di PT PLN (Persero) Area Tegal.
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di PT PLN (Persero) Area Tegal
5. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) Area Tegal pada kesempatan ini adalah pada sektor penyediaan energi, energi fosil dan terbarukan serta masalah ketenagalistrikan.

D. Sasaran Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke PT PLN (Persero) Area Tegal adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek), serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

E. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

a. Persiapan

- Menghimpun data dan informasi awal.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja.
- Mempersiapkan administrasi keberangkatan

b. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi didalam ruangan.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

F. Anggota Tim Kunjungan

Kunjungan kerja dilakukan oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan *representatif* dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat Komisi VII DPR RI, *sebagaimana terdapat dalam daftar lampiran*. Selain itu juga didampingi oleh mitra kerja Komisi VII DPR RI.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PT PLN WILAYAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021 TANGGAL 9 S.D 13 OKTOBER 2020				
NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1.	RAMSON SIAGIAN	A-104	P. GERINDRA	KETUA TIM
2.	BAMBANG WURYANTO	A-184	PDI PERJUANGAN	WK. TIM
3.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, SE	A-223	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	H. YULIAN GUNHAR, SH, MH	A-148	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	SYAFRUDDIN H. MAMING, S.Sos	A-248	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	PARAMITHA WIDYA KUSUMA, SE	A-198	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	Drs. H.M. GANDUNG PARDIMAN, MM	A-312	P. GOLKAR	ANGGOTA

8.	MAMAN ABDURAHMAN. ST	A-332	P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	MORENO SOEPRAPTO	A-110	P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	H. NURZAHEDI, SE	A-69	P. GERINDRA	ANGGOTA
11.	ARKANATA AKRAM, ST, BE (Hons), M.Eng.Sc	A-392	P. NASDEM	ANGGOTA
12.	H. SYAIKHUL ISLAM, Lc. M.Sosio	A-31	PKB	ANGGOTA
13.	Hj. RATNA JUWITA SARI, SE, MM	A-46	PKB	ANGGOTA
14.	SARTONO HUTOMO	A-555	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD NASIR	A-530	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH	A-524	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	RUSDA MAHMUD	A-573	P. DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	H. ROFIK HANANTO, SE	A-443	PKS	ANGGOTA
19.	MISBAKHUL HIDAYAT, S.Sos	SEKRETARIS TIM		
20.	R. SUGENG TRISASONO, M.Si			
21.	HARYADI KRAMA			
16.	Dr. ETIN DIAH PERMANA SARI	TENAGA AHLI		
17.	DWI UTOMO	TV PARLEMEN		
18.	NAFISA HANUM	PEMBERITAAN		
19.	REZA ABDUL QOHAR	DRIVER		

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi Kunjungan dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dilakukan pada 9 - 13 Oktober 2020 di PT PLN (Persero) Area Tegal.

Adapun agenda kunjungan kerja sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) Area Tegal yang dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI, Dirjen EBTKE KESDM RI, Bupati Tegal, Walikota Tegal, Kapolresta Tegal, Perwakilan Pemkab dan Pemko Wilayah Tegal, serta instansi terkait lainnya.
2. Peninjauan lapangan di PLN Gardu Induk (GI) Kebasen untuk mengetahui kendala dan tantangan ketenagalistrikan di wilayah Tegal.

B. Rangkuman Paparan dari Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

Sistem kelistrikan di wilayah Jawa Tengah dan DIY berada di bawah PLN UID Jateng dan DIY, terdiri dari: 13 UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan); 1 UP2D (Unit Pelaksana dan Pengatur Distribusi); 1 UP2K (Unit Pelayanan Pembangunan Kelistrikan); dan 79 ULP (Unit Layanan Pelanggan). Untuk wilayah Kota dan Kab. Tegal, Kab. Brebes dan Kab. Pemalang terdapat 1 UP3 yang masing-masing terletak di Kab. Brebes dan Kota Tegal, dan 10 ULP yang terletak di Kab. Brebes (seperti pada gambar).



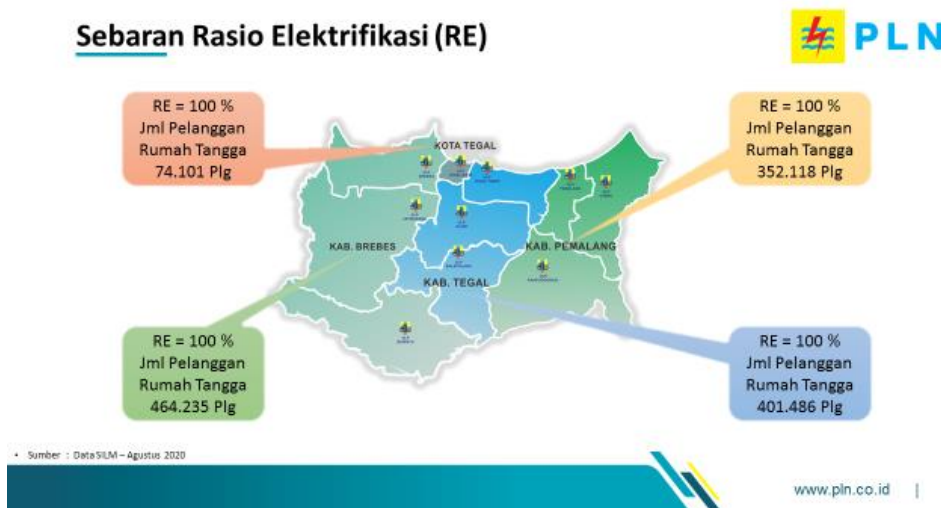
Gambar: Wilayah Kerja PLN UID Jateng dan DIY

Daya terpasang untuk seluruh Jawa Tengah saat ini (Agustus 2020) adalah **15.162 MVA**, yang berasal dari beberapa pembangkit (PLTA, PLTD, PLTU, PLTP, dan PLTGU), 5 subsistem, dan 76 Gardu Induk (GI). Dengan total beban puncak Jawa Tengah sebesar 4.473 MW, maka terdapat surplus listrik yang sangat cukup sebesar 4.566,72 MW. Surplus listrik di Jawa Tengah ini sebagian besar dialirkan ke daerah barat pulau Jawa yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat sekitar **2.523 MW**.



Gambar: Sistem Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY

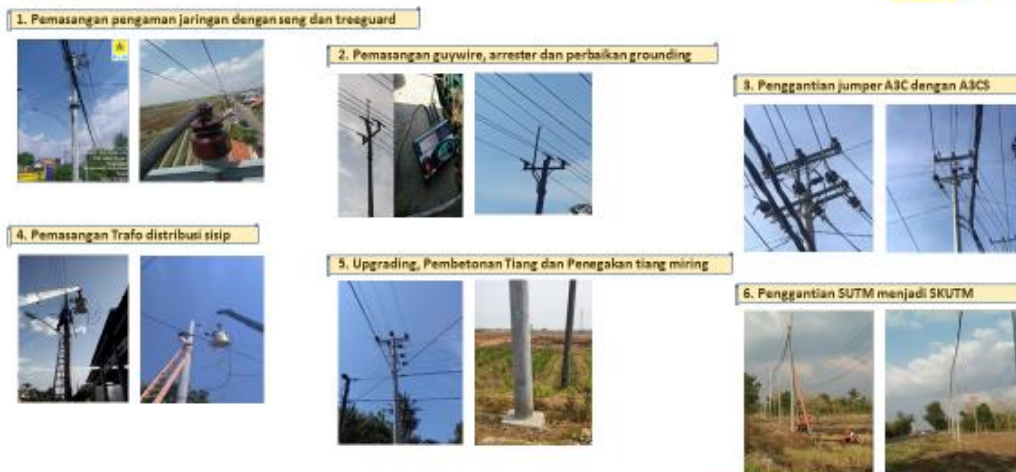
Rasio Elektrifikasi (RE) di Jawa Tengah sudah mencapai 99,99%, dimana RE untuk Kota dan Kab. Tegal, Kab. Brebes dan Kab. Pemalang adalah 100%.



Gambar: Rasio Elektrifikasi area Tegal dan sekitarnya

Dengan RE yang sangat tinggi tersebut seharusnya tidak ada permasalahan listrik yang signifikan dihadapi oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya. Namun kenyataan, masih saja ditemukan permasalahan listrik yaitu pemadaman listrik yang cukup lama terjadi di beberapa daerah. Beberapa upaya PT PLN (Persero) dalam penanganan tersebut diantaranya:

UPAYA PENINGKATAN KEHANDALAN



www.pln.co.id |

Upaya penanganan gangguan akibat layang-layang



www.pln.co.id |

Gambar: Penanganan beberapa gangguan listrik oleh PT PLN (Persero)

Secara keseluruhan beberapa hal yang disampaikan oleh PT PLN (Persero) Area Tegal adalah sebagai berikut:

1. Sistem kelistrikan di Jawa Tengah dan DIY terbagi menjadi Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Tanjungjati-Ungaran 3, Subsistem Kesugihan, Subsistem Pedan 1-2, dan Subsistem Pedan 3-4.
2. Sistem kelistrikan Jawa Bali merupakan satu kesatuan, sehingga *surplus* pasokan listrik di Jawa Tengah biasanya dialihkan ke DKI Jakarta dan Jawa Barat sebanyak **2.523 MW** tadi melalui jalur transmisi. Jalur transmisi ini terus diupayakan diperkuat untuk menjaga kestabilan aliran listrik dari Timur ke Barat. Beberapa langkah diambil oleh PT PLN (Persero) diantaranya:
 - a. Membagi jalur transmisi yang tadinya 2 jalur menjadi 4 jalur
 - b. Membangun pembangkit di daerah Banten agar Barat Pulau Jawa lebih mandiri dan tidak bergantung pada Timur Pulau Jawa.
3. Akan terdapat 4 jalur transmisi (yang akan menghubungkan sistem kelistrikan di Barat dan Timur Pulau Jawa) yang terdiri dari dua jalur eksisting (Surabaya, Semarang, Cirebon ke Bandung) dan dua jalur tambahan (Tanjungjati, Batang, Semarang, Cirebon, Indramayu ke Bekasi).
4. Akan ada tambahan listrik yang akan beroperasi sebesar 5.000 MW, yang salah satunya berasal dari PLTU Batang 2.000MW yang masih dalam tahap konstruksi.
5. Pertumbuhan ekonomi Kota dan Kab. Tegal saat ini cukup pesat dengan ditandai pertambahan signifikan jumlah UMKM di area Tegal, oleh karena itu peningkatan pasokan listrik harus terus diupayakan yang tentu saja mencerminkan adanya peningkatan skala ketahanan energi.
6. Terdapat sekitar **7.681 MW** pembangkit EBT yang eksisting di area Tegal. Untuk mendukung terwujudnya **15.000 MW** pembangkit EBT di area Tegal pada tahun 2028 nanti, maka masih sangat perlu dilakukan pembangunan-pembangunan pembangkit EBT secara masif dan signifikan. Oleh karena itu, Tegal berupaya membangun iklim investasi yang baik untuk menarik para investor dalam menanamkan modalnya di perencanaan pembangkit-pembangkit EBT di Tegal tersebut.

7. Saat ini akan dilakukan rencana pembangunan PLTB dengan kerja sama investasi dari *Aquo Energy*, yang mana akan dibangun pada area tiga desa dengan kapasitas sebesar 67,2 MW dan diproyeksikan akan melayani kebutuhan listrik 189.000 warga Kab. Tegal. Saat ini, rencana tersebut sudah berada pada tahap forum konsultasi masalah AMDAL dan akan memasuki tahapan lelang pemberian listrik oleh PT PLN (Persero). PLTB ini akan diproyeksikan menjadi PLTB yang pertama di Pulau Jawa.
8. Peningkatan pelayanan melalui *digitalisasi service* dengan diluncurkannya aplikasi baru yaitu *New PLN Mobile-Features*.



Gambar: Aplikasi New PLN Mobile – Features oleh PT PLN (Persero)

Beberapa masukan dari anggota Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI diantaranya:

1. PT PLN (Persero) diharapkan untuk memberikan sosialisasi informasi yang menyeluruh terhadap pelanggan terkait subsidi listrik PLN kepada pelanggan yang tepat. Untuk diketahui ada beberapa subsidi PLN antara lain:
 - 450VA (subsidi listrik gratis)
 - 900VA R1M (subsidi listrik 50%)
 - UMKM 450 VA golongan B (subsidi listrik gratis)
2. Percepatan rencana dan progress pembangunan pembangkit-pembangkit listrik EBT di area Tegal dan sekitarnya agar target Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW dapat terpenuhi.
3. Formula rasio elektrifikasi sebaiknya perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan baik kuantitas dan kualitas pasokan listrik di lapangan.

4. PT PLN (Persero) sebaiknya perlu memperhatikan penduduk-penduduk yang tinggal pada area berdampak tegangan tinggi, dengan memberikan kompensasi-kompensasi yang tepat dan sesuai.
5. PT PLN (Persero) diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan secara keseluruhan agar kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan tidak terjadi berulang-ulang.



Gambar: Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PT PLN (Persero) Area Tegal

BAB III

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN

Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI ke PT PLN (Persero) Area Tegal pada tanggal 9-13 Oktober 2020 menghasilkan kesimpulan, rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja PT PLN (Persero) terkait Rasio Elektrifikasi (RE) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang yang cukup tinggi, serta surplus pasokan listrik yang cukup banyak untuk Jawa Tengah.
2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja PT PLN (Persero) Gardu Induk Kebasen atas kestabilan *supply* listrik ke daerah pantai utara (pantura) pulau Jawa yang mana sebagian besar daerah pantura tersebut merupakan kawasan industri Tegal yang sedang sangat berkembang.
3. PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Jawa Bali adalah merupakan satu kesatuan, sehingga surplus pasokan listrik yang ada di Jawa Tengah biasanya akan dikirimkan atau dialihkan ke Jawa Barat sebesar 2.523 MW melalui jalur transmisi.
4. PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa secara garis besar untuk meningkatkan kestabilan jaringan listrik pada sistem Jawa Bali tersebut dilakukanlah dua hal penting diantaranya:
 - a. Memperkuat jalur transmisi dari 2 jalur menjadi 4 jalur, sehingga probabilitas aliran listrik yang jelek dapat dikurangi.
 - b. Dibangunnya pembangkit di daerah Banten agar tidak terjadi kekurangan listrik di daerah Barat pulau Jawa (DKI Jakarta dan Jawa Barat), sehingga daerah Barat menjadi mandiri dan tidak bergantung pada daerah Timur.
5. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk lebih menindaklanjuti temuan-temuan masalah kelistrikan di lapangan termasuk pemadaman-pemadaman listrik di beberapa daerah di Jawa Tengah (Kota dan Kab. Tegal, Kab. Brebes, dan Kab. Pemalang) serta masalah subsidi listrik yang tepat kepada pelanggan yang tepat.

6. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI merekomendasikan PT PLN (Persero) untuk lebih memperhatikan perhitungan formula Rasio Elektrifikasi (RE) yang tidak berpaku pada kuantitas saja, namun juga memperhatikan *variable* akan kualitas pelayanan aliran listrik di lapangan.
7. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kota dan Kab. Tegal terkait terbukanya iklim investasi yang baik di area Tegal untuk para investor dalam perencanaan pembangkit-pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan potensi-potensi alam wilayah Tegal.
8. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam peluncuran *new PLN mobile* dalam rangka peningkatan pelayanan melalui *digitalisasi service*.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian hasil pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT PLN (Persero) Area Tegal yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 13 Oktober 2020. Semoga hasil kegiatan kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Terimakasih.

Jakarta, 13 Oktober 2020
Komisi VII DPR RI